

# Ekonomi Indonesia

## Menuju 2020



Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi realitas yang mau tidak mau harus diterima tanpa dapat dihindari. Dalam menghadapi arus globalisasi tersebut, berbagai belahan dunia membentuk blok (misalnya NAFTA, EU, *West African Economic Union*, AFTA, *South American Community*) untuk memperkuat posisi mereka dalam percaturan ekonomi dunia. Akan tetapi, kecenderungan menunjukkan bahwa ekonomi dunia di masa datang akan terpusat di tiga kutub ekonomi, yaitu Amerika Utara dengan NAFTA-nya, Eropa dengan EU-nya dan Asia Timur dengan motor ASEAN+3 (Jepang, China dan Korea).

Artikel ini khusus disiapkan untuk mengulas secara singkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia tersebut.

### Sekilas Ekonomi Indonesia

Sebagai sebuah negara besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya, ternyata Indonesia bukanlah negara yang besar dari sisi ekonomi. Indonesia hanya berada pada peringkat ke-7 di Asia, atau peringkat ke-26 di dunia (*Microsoft Encarta Weltatlas*, 2001).

Posisi di atas cukup menyedihkan mengingat Indonesia sebenarnya negara yang sangat kaya akan sumberdaya alam. Disamping anugerah berupa minyak bumi, gas alam,

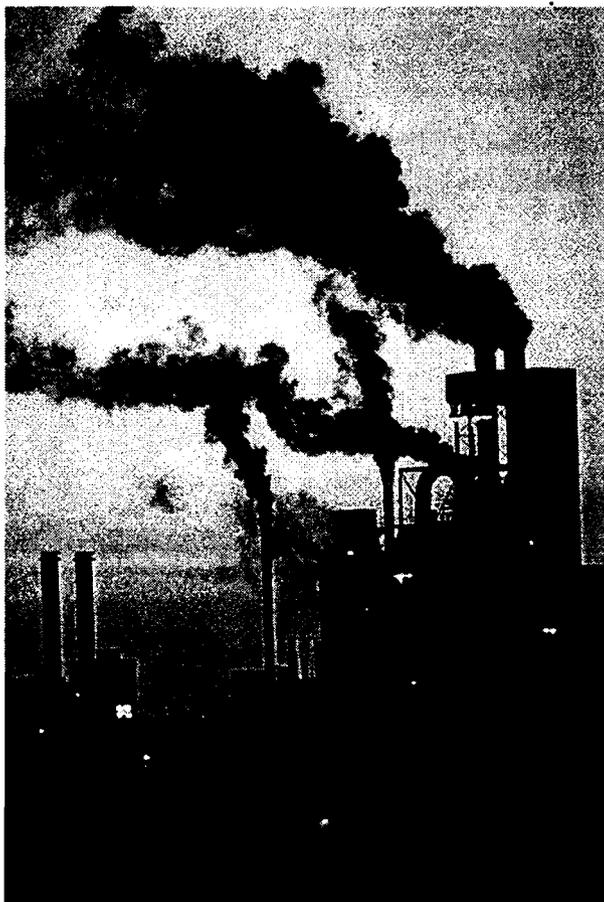
Oleh:  
**Noer Azam Achsani<sup>1)</sup>**

<sup>1</sup> Penulis adalah staf pengajar Jurusan Matematika FMIPA, Institut Pertanian Bogor.

emas, tembaga serta beraneka ragam bahan tambang lainnya, Indonesia juga memiliki potensi pertanian yang luar biasa, mulai dari teh, kopi, karet, kakao, kelapa sawit, rempah-rempah sampai dengan produk pertanian dan perikanan. Keadaan demikian tidak terlepas dari sejarah ekonominya yang relatif singkat, lengkap dengan problematika yang masih melingkupinya hingga saat ini.

Dari tahun 1971 - 1981 Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan sangat mengesankan (di atas 5 persen per tahun). Keberhasilan tersebut terutama karena adanya „durian runtuh” berupa lonjakan harga minyak dari hanya 4 US\$ per barel pada tahun 1971 menjadi 14 US\$ pada tahun 1977 dan bahkan mencapai sekitar 35 US\$ pada

tahun 1981. Akan tetapi, seiring jatuhnya harga minyak mulai sekitar awal 1982 (menjadi hanya sekitar 10 US\$ per barrel), maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melambat (kurang dari 5 persen per tahun). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan untuk mendorong pertumbuhan ekspor non-migas. Sebagai hasilnya, mulai tahun 1988-1997 ekonomi Indonesia kembali tumbuh secara mengesankan. Pertumbuhan ekonomi saat itu tidak terlepas dari proses industrialisasi yang digalakkan pemerintah dengan didukung oleh investasi asing dan pinjaman luar negeri. Karena sukses itu, Indonesia bersama-sama dengan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philippina dijuluki sebagai *the new Asian tiger* atau sering juga disebut *the new industrialized countries (NIC)*.



Belakangan terbukti bahwa julukan tersebut ternyata tidak tepat. Seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia sejak 1997, Indonesia seolah berubah menjadi macan ompong. Pada tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sekitar 12,5persen. Nilai mata uang anjlok sekitar 80 persen, sedangkan bursa saham anjlok lebih dari 50 persen. Selain itu, puluhan industri terpaksa ditutup karena kekurangan bahan baku yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara konsisten selama hampir 30 tahun seakan hilang seketika. Kemajuan yang dicapai selama ini ternyata hanyalah semu, karena fondasi ekonomi Indonesia ternyata sangat rapuh.

Setidaknya ada tiga „kesalahan” utama yang perlu kita jadikan catatan.

Pertama, pemerintah yang lalu membuat kesalahan besar dengan menganut system *trickle-down effect*, dimana jalannya roda perekonomian diperankan hanya kepada „sekelompok” orang tertentu. Sebagai akibatnya, keberhasilan pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian orang, sementara kehidupan sebagian besar penduduk lainnya tetap diliputi

kesederhanaan atau bahkan kemiskinan.

Kedua, proses industrialisasi yang dikembangkan selama ini pun tidak lebih hanya sekedar mengejar keuntungan jangka pendek. *Backward linkages* dan *forward linkages*

dari industri yang dikembangkan hampir tidak terlihat sama sekali. Industri yang ada tidak lebih hanyalah sekedar bengkel perakitan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang murah, serta sedikit sekali memanfaatkan ketersediaan bahan baku lokal.

Ketiga, mengandalkan hutang luar negeri untuk menopang jalannya pembangunan. Lebih parah lagi, hutang-hutang tersebut sebagian diantaranya adalah hutang jangka pendek dan digunakan untuk pembangunan ekonomi yang sifatnya jangka panjang.

Oleh karena itu, bisa dimengerti jika akhirnya hampir semua industri nyaris mati manakala krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1997 lalu. Jatuhnya mata uang rupiah membuat industri kita mengalami kelangkaan bahan baku yang tidak mampu diimpor lagi. Sebaliknya, para konglomerat pemilik modal lebih senang melarikan dananya ke luar negeri sehingga terjadi capital outflow besar-besaran. Disamping itu, hutang para konglomerat (yang kemudian dikonversi menjadi hutang publik pada masa pemerintahan Presiden Habibie), akhirnya menyeret Indonesia ke dalam krisis keuangan yang berkepanjangan hingga saat ini.

## **Problematika Ekonomi Saat Ini**

Di balik pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan di atas, perekonomian Indonesia saat ini menanggung permasalahan yang sangat berat, diantaranya (Achsani, 2003):

*Pertama*, kesenjangan ekonomi antar wilayah yang sangat tajam. Jawa-Bali yang hanya mencakup 7,2% wilayah Indonesia, ternyata dihuni oleh 64% penduduk dan menyumbang sekitar 60% ke dalam PDB Indonesia. Sebaliknya, Papua misalnya, mencakup luasan sebesar 22% wilayah Indonesia, tetapi hanya dihuni oleh 0,8%

penduduk dan menyumbang sekitar 2,1 persen PDB Indonesia.

*Kedua*, kesenjangan ekonomi antar sektor yang juga luar biasa besar. Sebagai gambaran, data tahun 1998 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya memiliki kontribusi sebesar 19% dari total PDB, akan tetapi masih menyerap sekitar 45% tenaga kerja. Sektor lainnya, Industri misalnya, yang menyumbang hampir 25% PDB, hanya mampu menyerap 11% tenaga kerja. Kondisi demikian tentu saja sangat berpengaruh ke kesejahteraan pekerjanya.

Jika produktifitas dirumuskan sebagai rasio antara PDB dan jumlah tenaga kerja yang terlibat didalamnya, maka sektor pertanian hanya mempunyai index sebesar 0,4 (yang berarti hanya 40% produktivitas rata-rata nasional). Sebaliknya, sektor pertambangan memiliki index sebesar 17,2 yang berarti 1700% dibandingkan produktivitas rata-rata nasional. Dengan demikian, tenaga kerja sektor pertambangan rata-rata 45 kali lebih makmur dibandingkan tenaga kerja di sektor pertanian.

*Ketiga*, jumlah pengangguran yang luar biasa. Bulan Januari 2002 Menakertrans sempat menyebut angka pengangguran sebesar 40 juta (yang berarti mencapai 40-an persen) yang kemudian diralat. Data resmi menunjukkan pengangguran di Indonesia sebesar 9,8 persen. Di tahun-tahun mendatang jumlah pengangguran akan semakin meningkat lagi. Di satu sisi, setiap tahun akan masuk jutaan angkatan kerja baru. Di lain pihak —dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun— lapangan kerja baru yang bisa diciptakan tidak akan sebanding dengan jumlah pengangguran yang ada ditambah dengan angkatan kerja baru.

*Keempat*, beban hutang yang sangat besar. Pada akhir 2001 lalu, posisi hutang luar negeri (LN) pemerintah tercatat USD 71,4 Milyar dan hutang dalam negeri (DN)

pemerintah sebesar Rp 659,- Triliun. Jika ditambah dengan hutang LN swasta yang besarnya mencapai USD 63,4 Milyar, maka total hutang Indonesia (*pemerintah dan swasta*) saat ini mencapai sekitar Rp 2.100 Triliun pada kurs Rp 10.000,- per USD. Sejak 2002 pemerintah telah melunasi sebagian hutang-hutangnya, akan tetapi pemerintah juga melakukan beberapa peminjaman baru.

Posisi hutang yang demikian besar tentunya sangat berbahaya. Prof. Ricardo Hausmann dari *School of Government, Harvard University*, dalam makalahnya yang dipresentasikan di *Chulalongkorn University* akhir Oktober 2001, menjelaskan „bahayanya” hutang ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- 1) „*Avoid short-term domestic public debt, it can kill you!* (hindari hutang publik dalam negeri yang berjangka pendek, itu bisa membunuhmu)”. Sebagaimana kita ketahui bersama, pinjaman DN biasanya berbunga tinggi sebagaimana SBI, sehingga setiap pergerakan suku bunga akan mempengaruhi pengeluaran fiskal, yang pada tahap tertentu bisa menyeret negara ke dalam *self-fulfilling inflationary crisis* sebagaimana diungkapkan oleh Calvo (1989).

Pada suatu kondisi dimana pasar menduga bahwa laju inflasi akan tinggi, maka ada kecenderungan bahwa nilai mata uang akan melemah terhadap dollar. Untuk mengatasi hal ini, otoritas bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk menjaga agar mata uang tidak jatuh. Akan tetapi kenaikan suku bunga ini akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran karena bertambahnya pengeluaran untuk membayar bunga hutang (untuk tahun 2001-2002, kenaikan suku bunga 1% sudah akan menambah pengeluaran sebesar 2,8 Triliun). Tingginya suku bunga tersebut akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam kalkulasi moneter, yang pada akhirnya justru akan memaksa

pemerintah menyediakan lebih banyak uang lagi. Kasus demikian menimpa Argentina pada awal 1980-an yang menyeret Argentina ke dalam *hyper inflasi*.

- 2) „*But short-term debt in foreign currency can also kill you!* (hutang jangka pendek dalam mata uang asing juga bisa membunuhmu)”. Di satu sisi, banyaknya uang yang beredar (misal USD) berada dalam jumlah tertentu dan tidak “tak-terbatas”. Sebaliknya, permintaan akan uang tersebut datang dari banyak pihak (negara). Dalam kondisi dimana permintaan dari pihak lain sangat tinggi, dan kewajiban membayar hutang suatu negara juga besar, maka sebagai akibatnya akan muncul kepanikan sebagaimana terjadi di Mexico (1984) dan Korea Selatan (1997).
- 3) “*Dollar debt can kill you!* (Pinjaman dalam bentuk dollar juga bisa membunuhmu)” Menurut Chang dan Valasco (2000), suatu sistem perbankan tidak akan mengalami krisis jika ia menerapkan *regime* mata uang mengambang dan memiliki kewajiban membayar hutang dalam bentuk mata uang lokal. Dalam hal demikian, bank sentral memiliki kredibilitas kuat untuk membayar hutang dalam mata uang yang dikendalikannya. Akan tetapi, jika kurs mata uang dibuat mengambang dan kewajiban membayar hutang dalam bentuk dollar, maka ada kemungkinan negara akan mengalami krisis keuangan apabila kurs mata uang ambruk secara tiba-tiba, sebagaimana yang terjadi di Ecuador. Kasus ini menimpa Indonesia tahun 1997-1998 lalu.
- 4) „... *and even if they do not, the currency mismatches they generated make monetary policy less effective* (dan bahkan jika mereka (hutang LN) tidak membunuhmu, problema kurs yang mereka ciptakan akan membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif)”. Kewajiban mengembalikan hutang dalam

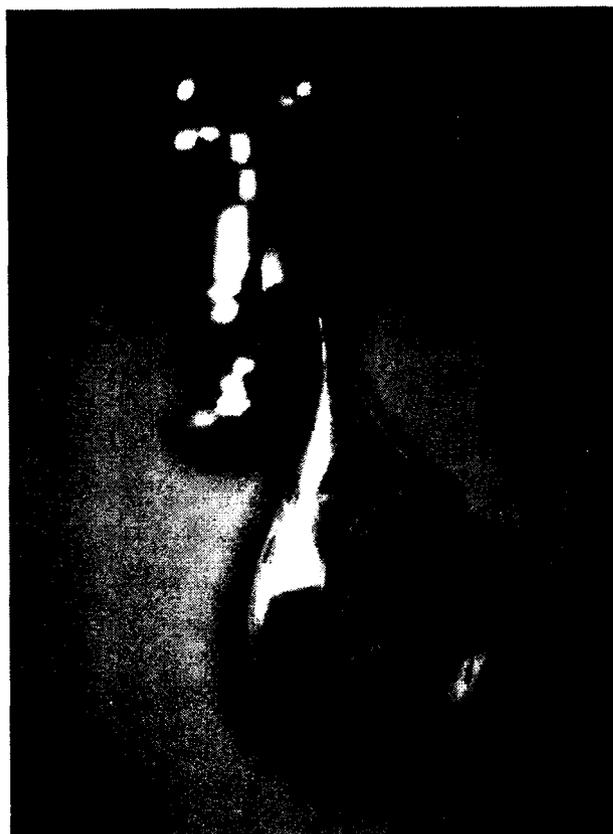
bentuk dollar akan memberikan efek ke neraca pembayaran yang seringkali menghilangkan kelebihan sistem kurs mengambang serta *inflation targeting* seperti yang dianut Indonesia saat ini.

Fenomena ini diterangkan dengan gamblang oleh Svensson (1998). Penurunan suku bunga (dalam kondisi *ceteris paribus*) normalnya akan diikuti oleh depresiasi nilai mata uang lokal, yang selanjutnya akan meningkatkan agregat permintaan karena ekspor meningkat (harga di LN menjadi murah). Sebaliknya, depresiasi kurs lokal juga akan membebani perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk dollar. Dalam kondisi demikian, perubahan suku bunga bisa berefek negatif atau positif (tetapi kecil), bergantung pada kekuatan kedua faktor tersebut.

Dalam keadaan demikian, *inflation targeting* menjadi sangat problematis. Jika suku bunga berefek positif-kecil ke permintaan, maka suku bunga harus sering diubah agar ada efek yang signifikan ke permintaan. Akan tetapi hal ini akan membuat suku bunga menjadi *volatile*. Sebaliknya jika suku bunga berefek negatif ke permintaan, maka suku bunga harus diubah ke arah yang berlawanan. Akan tetapi menaikkan suku bunga juga bukan kebijakan yang tepat dalam kondisi ekonomi yang lesu. Dilema demikian dibahas panjang lebar dalam Calvo dan Reinhart (2000), Aghion, Bacchetta dan Banerjee (1999), Chang, Velasco dan Cespedes (2000), Velasco (2001) dan Hausmann, Panizza dan Stein (2001).

## Tantangan di Masa Depan

Dalam kondisi yang masih „sakit” dan dengan beban hutang yang luar biasa seperti saat ini, ekonomi kita masih diterjang pula oleh liberalisasi perdagangan dunia. Tantangan paling besar (sekaligus peluang kalau Indone-



sia bisa memanfaatkan) adalah NAFTA dan EU. Bahkan Mei 2004, EU telah memasukkan 10 negara eropa timur ke dalam kenagotaan EU. Belum lagi masuknya China, Rusia dan Vietnam ke dalam perekonomian dunia. Perluasan EU dan hadirnya China-Rusia-Vietnam ini mau tidak mau akan membawa dampak bagi Indonesia, karena mereka mirip Indonesia dan produk-produk mereka akan menjadi saingan berat bagi ekspor Indonesia.

Di kawasan Asia pun, tantangan tidak kalah berat. Mulai Januari 2003, kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) sudah mulai diberlakukan. Konsekuensinya, barang-barang produksi negara-negara ASEAN saat ini telah „bebas” berkeliaran di kawasan ini tanpa bisa dihindari karena segala bentuk tarif dan hambatan ekspor-impor akan dihilangkan atau paling tidak ditekan serendah mungkin (maksimal 5%). Tidak perlu heran jika negara kita kebanjiran barang-barang impor berharga sangat murah. Sebaliknya, barang-barang produk Indonesia juga bebas dipasarkan ke negara anggota ASEAN lainnya sepanjang bisa bersaing dengan produk negara-negara lain.

Dari hasil *search* di *www.republika.co.id* dan *www.kompas.com* dengan kata kunci AFTA, ditemukan lebih 300 berita terkait dan mayoritas memberitakan tentang ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapinya. Komentar ketidaksiapan datang dari menteri, pejabat pusat maupun daerah, pengusaha nasional, ketua asosiasi sampai ke petani. Dari sisi sektoral, ketidaksiapannya pun sangat lengkap. Dari industri berat, industri kimia, tekstil, pariwisata sampai pertanian.

Belum hilang „*kegamangan*” akan datangnya era perdagangan bebas dan AFTA, kita sudah harus bersiap-siap untuk menghadapi era „Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020” yang perjanjiannya telah ditandatangani oleh para Kepala Negara ASEAN tanggal 8 Oktober 2003 (Bali Concorde II). Kecenderungan ke depan bahkan akan mengarah ke terbentuknya East-Asian Economic Community yang tidak hanya melibatkan 10 negara ASEAN, tetapi juga China, Jepang dan Korea. Usaha-usaha ke arah itu sudah dimulai dengan ditandatanganinya perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* dan juga *Joint Declaration on the Comprehensive Economic Partnership* antara ASEAN-Jepang.

“Masyarakat Ekonomi ASEAN” sendiri kira-kira akan mirip dengan Pasar Tunggal Eropa (*European single market*) saat ini dan bisa digambarkan sebagai satu kawasan ekonomi tanpa *frontier* dimana setiap penduduk maupun sumber daya dari setiap negara anggota bisa bergerak bebas di negara-negara anggota lainnya (sebagaimana dalam negeri sendiri). Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kegunaan yang paling optimal yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kemakmuran (kesejahteraan) yang sama (merata) diantara negara-negara anggota ASEAN.

Konsep ini —kalau mengikuti European Union (EU) yang kelihatannya akan dijadikan model oleh ASEAN—

dilandasi oleh empat pilar utama sebagai berikut:

- 1) *Free movement of goods*. Konsep ini memungkinkan terjadinya pergerakan barang-barang tanpa ada hambatan (pajak bea masuk, tarif, kuota dll), yang merupakan bentuk lanjut dari kawasan perdagangan bebas (sebagaimana AFTA) dengan menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan (*obstacles*) yang tersisa. Dengan demikian, barang-barang produksi negara anggota ASEAN akan bebas diperjual belikan di seluruh kawasan sebagaimana di negeri sendiri. Pada akhirnya konsumen akan bisa mendapatkan barang „terbaik” dengan harga „termurah”
- 2) *Freedom of movement for workers*. Konsep ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menemukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Selanjutnya, mobilitas tenaga kerja akan mendorong terjadinya kontak dan meningkatkan saling pengertian antar sesama penduduk negara-negara ASEAN. Konsekuensinya, warga negara ASEAN akan bebas bekerja di Indonesia dan sebaliknya setiap WNI akan punya kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di seluruh kawasan ASEAN. Pengecualian tentu saja masih dimungkinkan, misalnya untuk tentara atau polisi.
- 3) *Freedom of establishment and provision of services and mutual recognition of diplomas*. Konsep ini menjamin setiap *expert* warga negara ASEAN akan bebas membuka praktek layanan di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan. Konsekuensinya setiap dokter, akuntan, pengacara dan WNI profesional lainnya akan bebas membuka praktek di negara-negara ASEAN

lainnya, sebagaimana halnya dokter serta profesional dari negara ASEAN akan bebas membuka praktek di seluruh wilayah Indonesia.

- 4) *Free movement of capital*. Konsep ini akan menjamin bahwa modal atau kapital akan bisa berpindah secara leluasa diantara negara-negara ASEAN, yang secara teoritis memungkinkan terjadinya penanaman modal secara efisien. Dengan demikian, setiap pemilik modal baik WNI maupun waga negara lainnya akan bebas dan leluasa memindahkan investasinya dari Indonesia ke negara ASEAN —atau sebaliknya— demi mencapai efisiensi tertinggi tanpa bisa dicegah.

Dengan demikian apa dampaknya bagi Indonesia? Sangat besar tentunya.

*Pertama*, perdagangan antar negara akan berlangsung sangat bebas, jauh lebih bebas dari era AFTA. Di dalam AFTA, pemerintah masih dimungkinkan misalnya menerapkan bea masuk 1 sampai 5 persen atau juga mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi industri atau barang-barang produksi dalam negeri yang sangat sensitif. Sebaliknya, pada tahun 2020 nanti barang-barang produk Indonesia akan sepenuhnya bersaing dengan barang-barang produksi negara lainnya. Dengan kualitas yang ada saat ini serta tingginya pajak dan pungutan sebagaimana banyak dikeluhkan pengusaha, niscaya akan sangat sulit bagi barang Indonesia untuk bisa bersaing. Vietnam dan Kamboja memiliki keunggulan dalam hal tenaga kerja yang lebih murah, sedangkan Singapura, Malaysia dan Thailand sangat bersaing dalam kualitas dan juga manajemen.

*Kedua*, pergerakan tenaga kerja akan terjadi secara bebas yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia. Di satu sisi, persaingan tenaga kerja di dalam negeri akan sangat kompetitif. Pekerja kita tidak hanya akan bersaing

dengan sesama WNI, tetapi juga dengan seluruh warga ASEAN. Konsekuensinya, tenaga kerja Indonesia harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau minimal sama dengan tenaga kerja luar agar bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Padahal, kita tahu pasti bahwa kualitas pendidikan kita termasuk yang paling buruk diantara negara-negara ASEAN. Di lain pihak, kita juga sadar betul bahwa negeri-negeri tetangga kita menawarkan berbagai „*iming-iming*” untuk menarik ahli-ahli kita agar mau hijrah ke luar negeri. Kasus hengkangnya sejumlah dokter ke Malaysia, Singapura dan Brunei akhir-akhir ini adalah contoh yang sangat nyata. Jadi masuknya tenaga asing ke Indonesia serta keluarnya tenaga Indonesia ke luar negeri sama-sama bisa menimbulkan efek yang luar biasa besar.

Selain itu, akan terbuka pula kesempatan bagi dokter, pengacara, akuntan, ahli asuransi serta profesional dari negara lain untuk membuka praktek di Indonesia. Konsekuensinya, jika kualitas dokter dan profesional kita tidak bisa bersaing, maka mereka-mereka terpaksa menjadi penonton di negeri sendiri. Dalam mengatasi hal ini, asosiasi profesi semacam Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia dan asosiasi lainnya seharusnya bisa berperan secara signifikan.

*Ketiga*, persaingan untuk menarik investasi bagi kelangsungan pembangunan juga akan semakin berat dengan adanya prinsip *free movement of capital*. Jika dilihat dari kacamata ini, kasus hengkangnya *Sony*, *Aiwa*, *Nike* dan perusahaan lainnya dari Indonesia —yang sangat ramai dibicarakan dalam bulan November-Desember 2002 lalu— adalah fenomena yang sangat wajar dan tidak perlu ditanggapi secara emosional. Bahkan, bukan tidak mungkin pengusaha-pengusaha nasional kita justru akan menanamkan modalnya di negara-negara anggota ASEAN lain demi mencapai efisiensi yang lebih baik.

Untuk melihat kesiapan kita dalam menyongsong lahirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN serta melihat posisi relatif Indonesia dalam konstelasi ekonomi Asia Timur, berikut dilampirkan hasil simulasi yang penulis lakukan seandainya skenario Masyarakat Ekonomi ASEAN diterapkan saat ini. Simulasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu metode *Fuzzy-Clustering* pada data negara-negara ASEAN+3 dari tahun 1990-2001. Untuk melihat pengaruh “krisis keuangan Asia 1997”, data dipecah menjadi dua periode (sebelum dan setelah krisis). Peubah yang digunakan dalam simulasi ini sama dengan kriteria-nya EU (*Maastrich Treaty Criterion*), yaitu *debt/GDP Ratio*, *budget-deficit/GDP Ratio*, *exchange rates stability*, *inflation rates* dan *long-term interest rates*. Hasil simulasi bisa dilihat di Lampiran 1-2.

Dari Lampiran 1-2 tersebut, kita dapat melihat adanya pengelompokan yang relatif konsisten sebagai berikut:

- I : Singapore, Jepang, Korea dan China.
- II : Malaysia-Vietnam-Thailand
- III : Indonesia-Filipina
- IV : Myanmar, Kamboja, Laos
- V : Brunei Darusalam

Dari pengelompokan tersebut, jelas terlihat bahwa Indonesia ada di kelompok tengah bersama Filipina. Kalau memperhatikan kondisi ekonomi *real* saat ini, barangkali bisa dikatakan bahwa posisi Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Laos dan Kamboja. Indonesia bahkan kalah dari Vietnam yang merupakan anggota baru ASEAN.

Dari hasil pengelompokan tersebut, kita juga bisa menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi selama setahun terakhir. *Pertama*, hasil ini memperkuat sinyalemen kenapa investor asing cenderung menutup investasinya dari Indonesia sebagaimana kasus Sony, Aiwa, Nike dll dan mengalihkannya ke Vietnam, Malaysia atau China. *Kedua*, ini juga memberikan justifikasi ilmiah kenapa Mahathir Mohammad dan Takshin Sinawatra

langsung mengatakan „ya” ketika PM Goh Cok Tong mengutarakan ide Pasar Tunggal ASEAN pada KTT-ASEAN di Kamboja November 2002 lalu. *Ketiga*, menjadi bisa dimengerti pula kenapa Mr. Watanabe (Direktur JETRO Jepang) minta supaya pasar tunggal juga mencakup Korea Selatan, China dan Jepang. Semuan kebijakan dan komentar tersebut ternyata dilakukan dengan perhitungan sangat matang.

## Penutup

Dengan melihat persoalan yang masih dihadapi saat ini serta beratnya persaingan dengan negara-negara ASEAN lainnya, haruskah Indonesia menentang konsep „Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang telah disepakati pada KTT ASEAN di Bali, Oktober 2003 lalu? Tentu saja tidak.

Beberapa alasan disampaikan disini, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, tuntutan dunia memang mengarah kesana. Pepatah lama mengatakan „*Air besar batu bersibak*”. Dalam keadaan air bah atau banjir, batu-batu akan cenderung berkumpul satu sama lain agar tidak hanyut. Di tengah serbuan globalisasi dan liberalisasi perdagangan, mau tidak mau akan muncul blok-blok ekonomi. Tanpa membentuk blok perdagangan dengan negara tetangga, sangat sulit bagi Indonesia (dan Asia Tenggara secara umum) untuk bisa bersaing dengan blok perdagangan lain. Oleh karena itu, sangat wajar bila muncul pemikiran untuk membentuk blok perdagangan ASEAN untuk menyatukan kekuatan ASEAN dengan 530 juta penduduknya.

*Kedua* selain sisi negatif yang terkesan menakutkan, Masyarakat Ekonomi ASEAN juga punya sisi positif yang sangat besar. Jika konsep tersebut berjalan baik, maka kesenjangan ekonomi antar negara ASEAN akan bisa diperkecil, bahkan dalam jangka panjang akan tercapai

kemakmuran yang relatif sama. Ibarat mencari rata-rata, maka negara kaya akan tertarik ke bawah sedangkan negara miskin akan tertarik ke atas.

Selain itu, akan terbuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja secara bebas di negara-negara ASEAN lainnya, tentunya jika kualifikasinya memenuhi persyaratan. Dengan demikian, kasus pengusiran TKI dan kasus Nunukan tidak akan terjadi lagi. Masalah penguasaan bahasa tentunya menjadi faktor yang sangat mendesak untuk diperbaiki (disamping kemampuan teknis tentunya) agar para pekerja kita bisa bekerja di negara lain.

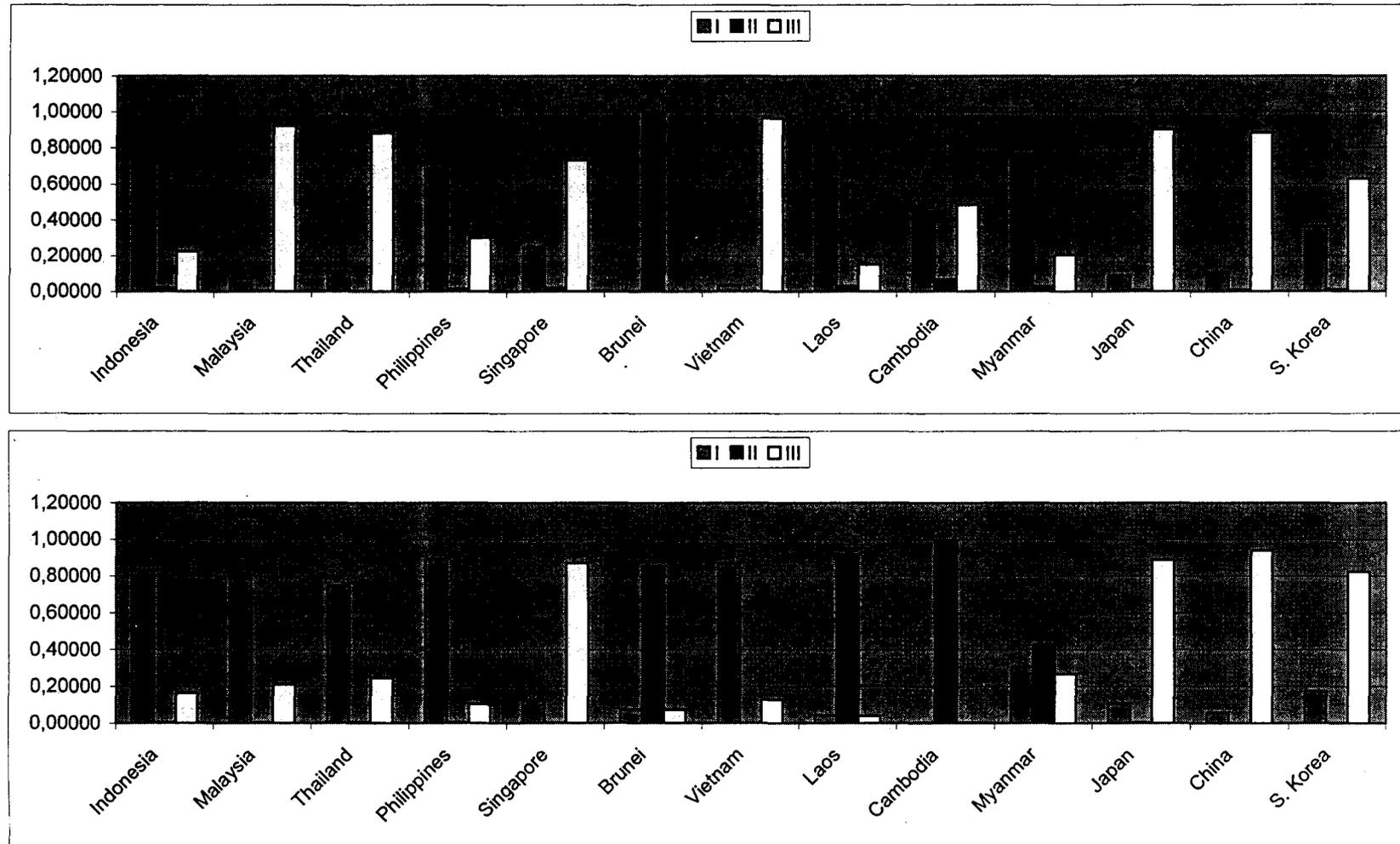
Akhirnya, keikutsertaan Indonesia ke dalam blok semacam ini tentunya merupakan „keputusan politik” pemerintah. Kalau Goh Cok Tong, Thaksin Shinawatra dan Ketua JETRO Watanabe mendukung ide demikian, tentunya itu bukan sekedar dukungan semata. Tim ahli mereka tentu sudah memikirkan segala aspek positif maupun negatifnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah maupun para ahli kita mengkaji secara mendalam dan memikirkan masak-masak segala persoalan yang terkait dengannya. Berbagai studi serta persiapan maksimal perlu dilakukan agar kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Tahapan-tahapan yang realistis perlu dipikirkan untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul. Jangan sampai kasus AFTA terulang kembali. Perjanjian AFTA sudah ditandatangani pemerintah, tetapi iklim usaha, aparat pemerintah maupun pelaku ekonomi sangat tidak siap.

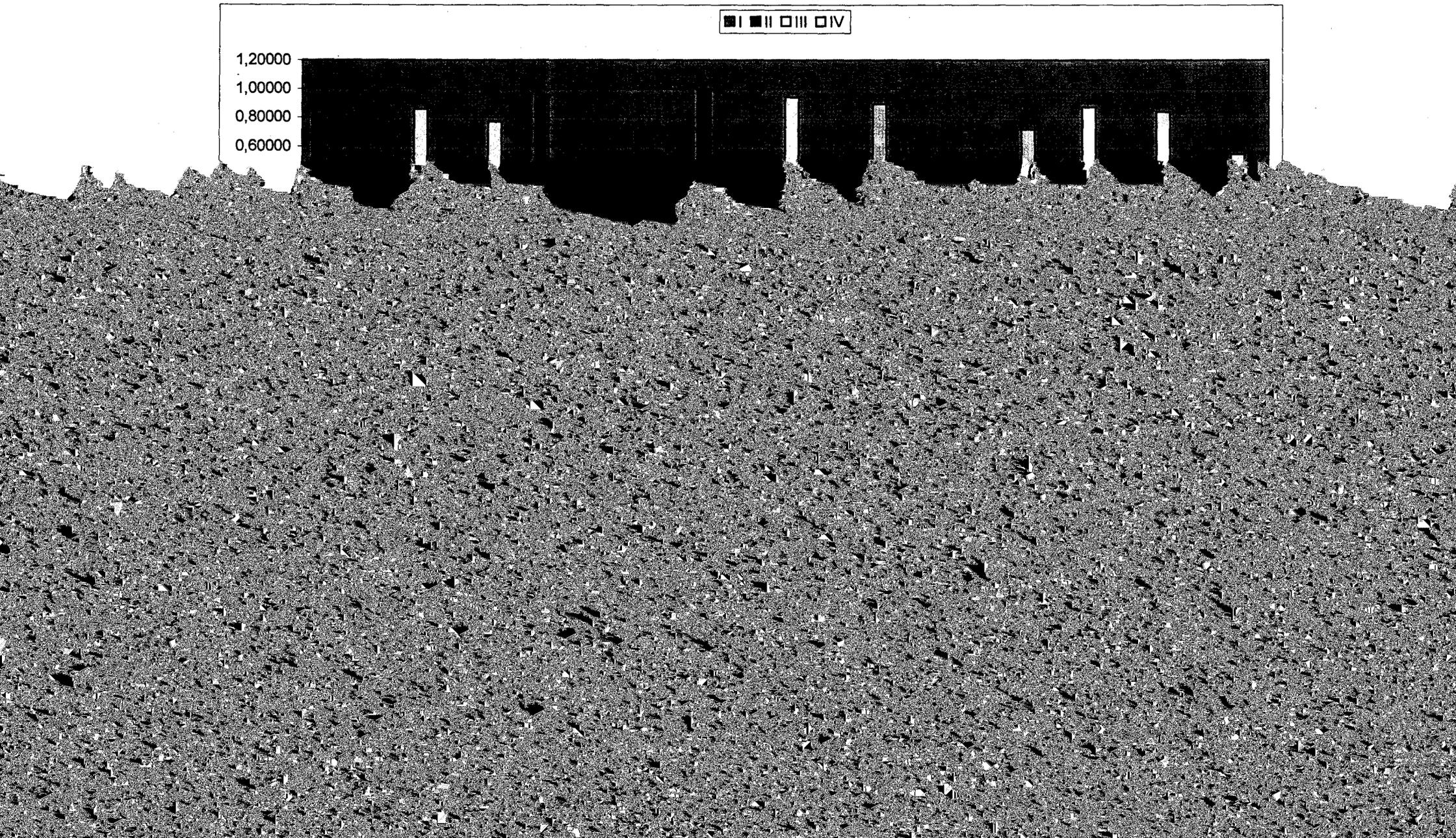
## Daftar Pustaka

- Achsani, N.A. dan H.G. Strohe. (2000). *Statistische Überblick über die indonesische Wirtschaft*. Discussion Paper of Statistics No 16. Fakultas Ekonomi, Universitas Potsdam
- Achsani, N.A. (2003). *Sekilas Ekonomi Indonesia: Sukses Masa Lalu, Problematika Saat Ini dan Tantangan Masa Depan*. Paper dipresentasikan pada Seminar Sehari ISCTECS Eropa bekerjasama dengan Pusat Kajian Asia Tenggara, Universitas Frankfurt. Frankfurt am Main, 5 Juli 2003.
- Aghion et al. (1999). *Capital Markets and the Instability of Open Economies*. CEPR Discussion Paper 2083, London.
- Artis dan Zhang (1998). *Memberships of EMU: A Fuzzy Clustering Analysis of Alternative Criteria*. European University Institute Working Papers RSC No. 98/52
- Calvo and Reinhart (2000). *Fear of Floating*. Paper dipresentasikan pada Conference on Currency Unions. Hoover Institute, Stanford University
- Chang et al. (2000). *Liquidity Crises in Emerging Markets: Theory and Policy*. NBER Working Paper W7272.
- Hausmann, R (2001). *The Dollarization Debate: Is it over?* Paper dipresentasikan pada Conference 2001.
- Svensson (1998). *Inflation Targeting as a Monetary Rule*. NBER Working paper W6970.
- Velasco (2001). *Balance Sheets and Exchange Rates Policy*. Unpublished Manuscript.

Lampiran 1a. Hasil Fuzzy-Clustering dengan 3 kelompok., periode sebelum krisis (atas) dan sesudah krisis (bawah).



Lampiran 1b. Hasil Fuzzy-Clustering dengan 4 kelompok., periode sebelum krisis (atas) dan sesudah krisis (bawah).



Lampiran 2. Pengelompokan Negara-negara ASEAN+3

Negara	3 Clusters		4 Clusters	
	Sebelum Krisis	Setelah Krisis	Sebelum Krisis	Setelah Krisis
Indonesia	1	1	1	1
Malaysia	3	1	3	1
Thailand	3	1	3	1
Philippines	1	1	1	1
Singapore	3	3	3	3
Brunei	2	2	2	2
Vietnam	3	1	3	1
Lao	1	2	4	2
Cambodia	1 (3)	2	3 (4)	2
Myanmar	1	2	4	4
Japan	3	3	3	3
China	3	3	3	3
S. Korea	3	3	3	3